

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

1. Erna Kurniawati (2009)

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang laporan keuangan sebagai alat menilai kinerja keuangan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan sebagai indikator kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan Secara simultan PDAM dalam keadaan rendabel. Walaupun terjadi dalam Likuiditas dan Rentabilitas, namun perusahaan masih dapat meningkatkan profit marginnya, dan meningkatkan rasio operasi secara efektifitas tenaga kerjanya dari tahun 2004 – 2008. Untuk rasio profit margin dan rasio operasi menunjukkan PDAM dalam keadaan yang *inefisiensi*, atau bekerja dengan biaya operasional yang sangat besar. Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Profit Margin, Rasio Operasi dan Efisiensi Tenaga kerja, terbukti berbeda signifikan positif dalam menilai kinerja keuangan PDAM selama 5 tahun.

#### Persamaan

Penelitian ini meneliti tentang penilaian kinerja keuangan dan analisis kinerja keuangan sebagai penilaiannya.

## Perbedaan

Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Sorong, Papua. Data yang dipakai berupa laporan keuangan yang berupa Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas. Alat pengukuran kinerja menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Profit Margin, dan Rasio Operasi.

Sedangkan peneliti sekarang objek penelitiannya adalah pada Pemerintahan Daerah Kota Surabaya, data yang dipakai berupa Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran serta RAPBD dan mengukur kinerja menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

## 2. Paidi Hidayat, Wahyu Ario Pratomo, D. Agus Harjito (2007)

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *Time Series* yang bersumber dari BPS ( Badan Pusat Statistik ) dan Departemen Keuangan untuk kurun waktu 2001-2006. Penelitian ini dilakukan di Propinsi Sumatera Utara dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Phakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Padang Sidempuan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari sisi pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, Kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang Hasundutan

dan Phakpak Barat secara rata-rata mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Sedangkan Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kota Padang Sidempuan mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pengeluarannya. Dilihat dari indikator kinerja PAD, Kabupaten/Kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan PAD yang positif tetapi relative masih kecil peranannya dalam struktur APBD. Dari peta kemampuan keuangan (metode kuadran), mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

#### Persamaan

Penelitian ini meneliti tentang penilaian kinerja keuangan dan analisis kinerja keuangan sebagai penilaiannya.

#### Perbedaan

Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah di Propinsi Sumatera Utara yang merupakan Kabupaten/Kota Pemekaran. Data yang digunakan menggunakan data sekunder dengan jenis data *Time Series* dan Mengukur Kinerja menggunakan Analisis Pertumbuhan, Analisis Peranan, dan Analisis Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran). Sedangkan peneliti sekarang objek penelitiannya di Pemerintahan Daerah Surabaya. Data yang digunakan berupa Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran serta RAPBD dan pengukur kinerja keuangan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

### 3. Gideon Tri Budi Susilo, Priyo Hariadi (2007)

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, karena penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan pada Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruh Kabupaten dan Kota (29 kabupaten dan 6 kota) yang diterbitkan oleh BPS Jawa Tengah. Periode pengukuran adalah dua tahun sebelum otonomi daerah yaitu 1999/2000-2000/2001 dan empat tahun sesudah otonomi yaitu 2001-2004. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian Daerah setelah otonomi tidak lebih baik daripada sebelum otonomi dan tingkat Aktivitas belanja pembangunan setelah otonomi tidak lebih baik dibandingkan sebelum otonomi.

#### Persamaan

Penelitian ini meneliti tentang penilaian kinerja keuangan dan analisis kinerja keuangan sebagai penilaiannya.

#### Perbedaan

Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam kurun waktu dua tahun sebelum otonomi daerah dan empat tahun sesudah otonomi daerah dan mengukur kinerja menggunakan Rasio Kemandirian dan Rasio Aktivitas. Sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah Kota Surabaya. Data yang digunakan dalam kurun waktu empat tahun sebelum otonomi daerah dan empat tahun

sesudah otonomi daerah. Pengukuran kinerja menggunakan Rasio Kemandirian Daerah, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

## **2.2 Landasan Teori**

Pada landasan teori ini akan dijelaskan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan digunakan dalam analisis.

### **2.2.1 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

#### **1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004**

Pada Undang-undang ini membahas tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantua, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004**

Pada Undang-undang ini membahas tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana undang-undang ini mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas

Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

### **3. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara**

Pada peraturan ini membahas tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Kinerja instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa indikator kerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.

### **4. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005**

Pada peraturan ini membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana peraturan ini menyatakan standar-standar yang harus dipenuhi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

### **5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005**

Peraturan ini membahas mengenai Dana Perimbangan, dimana terdapat hubungan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terdapat unsur-unsur yang ada dalam

laporan keuangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

#### **6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005**

Peraturan ini membahas tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini berhubungan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga perlu menetapkan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **7. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2006**

Peraturan ini membahas tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menjadi pedoman umum untuk Pemerintah pusat dalam Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kandungan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Keuangan dan laporan Kinerja.

### **2.2.2 Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 1, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3 Daerah Otonom**

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pada Pasal 1, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2.4 Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, kinerja keuangan daerah merupakan pengikhtisaran indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012) Kinerja keuangan daerah merupakan kinerja keuangan yang tercermin dari enam rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, *debt service coverage ratio*, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

### **2.2.5 Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut *American Accounting Association* Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah – pemda (kabupaten, kota atau provinsi) (Abdul Halim 2007:32).

### **2.2.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam standar akuntansi pemerintah No.

1. Standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. (Wuryan Andayani 2007 ; 135)

Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal, yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD.
2. Dari sisi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. (Mahmudi 2007;2)

### **2.2.7 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran

3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Lampiran : Laporan Keuangan BUMD

Dari kelima jenis laporan tersebut, biasanya yang dipublikasikan hanya tiga laporan utama saja, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas (Mahmudi 2007:61)

### **2.2.8 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

1. Elemen Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

- a. Aset

Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa datang. Aset diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Aset lancar

Merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terkait penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, sedangkan investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

3. Aset tetap

Merupakan aset terwujud yang dimiliki pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4. Aset lainnya

merupakan aset yang diluar dari aset tetap maupun aset lancar. Misalkan, Aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan Perbendaharaan, dll.

b. Kewajiban

Kewajiban memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan hutang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Misalkan, Hutang Transfer, Hutang Gaji Pegawai, Hutang Bank, dll.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan hutang pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun (12 bulan) setelah tanggal pelaporan

- c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Ekuitas dana lancar

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

2. Ekuitas dana investasi

Merupakan cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas dana cadangan

Merupakan cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

2. Elemen Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas empat elemen utama, yaitu;

## 1. Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

## 2. Belanja

Pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tak Terduga

## 3. Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

## 4. Pembiayaan

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

### 3. Elemen Arus Kas

Laporan Arus Kas dibagi dalam empat aktivitas utama, yaitu :

1. Arus kas dari aktivitas operasi
2. Arus kas dari aktivitas investasi
3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
4. Arus kas dari aktivitas nonanggaran

### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyajian catatan atas laporan keuangan dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara pihak penyaji dengan pengguna laporan mengenai informasi keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan
- b. Melengkapi informasi dalam laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas yang bersifat garis besar, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan baik pengguna laporan.
- c. Mengungkapkan informasi penting yang berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik.

Berikut contoh Laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Arus Kas pada Pemerintah Kota Prabumulih Palembang

**Gambar 2.2.4**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
NERACA DAERAH  
Per 31 Desember 2008 dan 2007 (dalam bentuk rupiah)

Keterangan	2008	2007
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
<b>KAS</b>		
Kas di BUD	99.045.725.956,36	157.716.353.283,40
Kas di bendahara penerimaan	9.095.173,00	1.396.167,00
Kas di bendahara pengeluaran	8.730.116.397,00	8.971.452.591,00
Investasi jangka pendek	0,00	0,00
<b>Jumlah Kas</b>	<b>107.784.937.526,36</b>	<b>166.689.202.041,40</b>
<b>PIUTANG</b>		
Piutang Pajak	26.490.706,89	0,00
Piutang Retribusi	112.610.000,00	0,00
Piutang Dana bagi hasil	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>139.100.706,89</b>	<b>0,00</b>
<b>PIUTANG LAIN-LAIN</b>		
Piutang Bag. Lancar Penj.		
Angsuran	0,00	0,00
Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Penjualan Milik Daerah	0,00	0,00
Piutang Dividen	0,00	92.864.050,00
Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Piutang Fasilitas sosial dan Fasilitas umum	0,00	0,00
Piutang Pegawai	1.961.358.000,00	1.961.358.000,00
Piutang Biaya Pungut	0,00	1.516.351,00
Piutang PFK	855.915,00	0,00

Piutang Lainnya	563.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<b>2.525.213.915,00</b>	<b>2.055.738.401,00</b>
PERSEDIAAN	4.637.827.508,78	3.885.355.584,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>115.087.079.657,03</b>	<b>172.630.296.026,40</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman kepada Perus. Negara	0,00	0,00
Pinjaman kepada Perus. Daerah	0,00	0,00
Pinjaman kepada Perus. Daerah Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam SUN	0,00	0,00
Investasi Non Permanen lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.591.582.305,00	12.591.582.305,00
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>12.591.582.305,00</b>	<b>12.591.582.305,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	116.690.091.550,00	115.463.792.350,00
Peralatan dan Mesin	110.264.725.051,00	90.208.726.144,00
Gedung dan Bangunan	356.006.698.385,92	302.591.090.571,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	284.939.081.581,06	158.399.211.831,06
Aset Tetap Lainnya	3.186.053.500,00	1.711.581.300,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	87.255.058.591,43	82.768.703.546,54
Akum. Penyusutan	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>958.341.708.659,41</b>	<b>751.143.105.743,02</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	3.945.568.500,00	3.945.568.500,00
Aset lain-lain	59.375.000,00	59.375.000,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>4.004.943.500,00</b>	<b>4.004.943.500,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.090.025.314.121,44</b>	<b>940.369.927.574,42</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang PFK	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pajak	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang J.Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.446.768.030,00	18.933.398.418,00
<b>Jumlah Kewajiban J. Pendek</b>	<b>1.446.768.030,00</b>	<b>18,933.398.418,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban J. Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1.446.768.030,00</b>	<b>18.933.398.418,00</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
SiLPA	107.776.698.268,00	166.687.805.874,00
Cadangan Piutang	2.663.458.706,89	2.055.738.401,00
Cadangan Persediaan	4.637.827.508,78	3.885.355.584,00
Dana yang harus disediakan untuk Membayar Utang J.Pendek	(1.446.768.030,00)	(18.933.398.418,00)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	9.095.173,00	1.396.167,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>113.640.311.627,03</b>	<b>153.696.897.608,40</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Inv. Jangka Panjang	12.591.582.305,00	12.591.582.305,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	958.341.708.659,41	751.143.105.743,02

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	4.004.943.500,00	4.004.943.500,00
Dana yang harus Disediakan untuk Membayar utang J. Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>974.938.234.464,41</b>	<b>767.739.631.548,02</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>1.088.578.546.091,44</b>	<b>921.436.529.156,42</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.090.025.314.121,44</b>	<b>940.369.927.574,42</b>

Sumber : (Palembang.bpk.go.id)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2008

Keterangan	Anggaran	Realisasi tahun 2008	(%)
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	3.134.080.000,00	5.210.793.591,10	166,26%
Pendapatan Retribusi Daerah	3.209.500.000,00	3.182.583.024,00	99,16%
Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	200.000.000,00	528.193.190,42	264,10%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.787.000.000,00	7.536.222.622,30	85,77%
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>15.330.580.000,00</b>	<b>16.457.792.427,82</b>	<b>107,35%</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>			
Dana Bagi Hasil Pajak	66.965.277.872,00	56.605.686.717,00	84,53%
Dana Bagi Hasil SDA	72.916.166.000,00	95.705.558.038,00	131,25%
Dana Alokasi Umum	182.026.272.600,00	180.935.827.000,00	99,40%
Dana Alokasi Khusus	29.613.600.000,00	29.613.600.000,00	100,00%
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>351.521.316.472,00</b>	<b>362.860.671.755,00</b>	<b>103,23%</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>			
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	--
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	--
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.927.291.313,00	17.484.718.903,74	97,53%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	--
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pendapatan Provinsi</b>	<b>17.927.291.313,00</b>	<b>17.484.718.903,74</b>	<b>97,53%</b>

<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>369.448.607.785,00</b>	<b>380.345.390.658,74</b>	<b>102,95%</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	--
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	--
Penerimaan Lain-lain	0,00	1.111.635.495,00	--
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.635.495,00</b>	<b>--</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>384.779.187.785,00</b>	<b>397.914.818.581,56</b>	<b>103.41%</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>			
Belanja Pegawai	158.357.977.511,00	136.234.980.192,00	86,03%
Belanja Barang	86.719.185.012,00	66.059.964.310,21	76,18%
Bunga	0,00	0,00	--
Subsidi	0,00	0,00	--
Hibah	9.362.250.000,00	7.705.538.401,00	82,30%
Bantuan Sosial	23.266.920.950,00	20.637.201.200,00	88,70%
Bantuan Keuangan	2.620.000.000,00	1.685.000.000,00	64,31%
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>280.326.333.473,00</b>	<b>232.322.684.103,21</b>	<b>82,88%</b>
<b>BELANJA MODAL</b>			
Belanja Tanah	1.500.000.000,00	1.464.480.000,00	97,63%
Belanja Peralatan dan Mesin	30.361.259.872,00	20.404.918.907,00	67,21%
Belanja Gedung dan Bangunan	83.911.795.219,00	68.325.569.655,50	81,43%
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	151.556.178.295,00	131.241.491.321,89	86,60%
Belanja Aset Tetap Lainnya	811.426.800,00	770.082.200,00	94,90%
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>268.140.660.186,00</b>	<b>222.206.542.084,39</b>	<b>82,87%</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	--
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>548.966.993.659,00</b>	<b>454.529.226.187,60</b>	<b>82,80%</b>
<b>TRANSFER</b>			
Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	2.000.000.000,00	1.733.700.000,00	86,69%

Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	0,00	0,00	--
<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.733.700.000,00</b>	<b>86,69%</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>550.966.993.659,00</b>	<b>456.262.926.187,60</b>	<b>82,81%</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(166.187.805.874,00)</b>	<b>(58.348.107.606,04)</b>	<b>35,11%</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
Penggunaan SiLPA	166.687.805.874,00	166.687.805.874,40	100,00%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	--
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	--
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	--
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	--
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	--
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>166.687.805.874,00</b>	<b>166.687.805.874,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	--
Penyertaan Modal (Invsestasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00%
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	--
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	--
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>166.187.805.874,00</b>	<b>166.687.805.874,40</b>	<b>100,30%</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>108.339.698.268,36</b>	<b>--</b>

Sumber : (Palembang.bpk.go.id)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2008 dan 2007

No	Keterangan	Tahun 2008	Tahun 2007
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	Pendapatan Pajak daerah	5.210.793.591,10	3.376.075.393,00
	Pendapatan Retribusi daerah	3.182.583.024,00	2.623.450.403,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	528.193.190,42	346.747.973,00
	Lain-lain PAD yang sah	7.536.222.622,30	9.530.713.210,00
	Dana bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	152.311.244.755,00	132.388.852.404,00
	Dana alokasi umum	180.935.827.000,00	161.515.000.000,00
	Dana alokasi khusus	29.613.600.000,00	13.253.600.000,00
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.484.718.903,74	25.418.730.322,58
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	1.320.000.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	Penerimaan Lain-lain	1.111.635.495	964.615.600,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>397.914.818.581,56</b>	<b>350.737.785.305,58</b>
	<b>Arus Kas Keluar</b>		
	Belanja pegawai	136.234.980.192,00	97.686.701.424,00
	Belanja barang dan jasa	66.059.964.310,21	54.575.270.358,85
	Belanja bunga	0,00	0,00
	Belanja subsidi	0,00	0,00
	Belanja hibah	7.705.538.401,00	0,00
	Belanja bantuan sosial	20.637.201.200,00	13.102.949.043,00
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes	1.733.700.000,00	1.196.650.000,00
	Belanja bantuan keuangan	1.685.000.000,00	195.286.400,00
	Belanja tak terduga	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>234.056.384.103,21</b>	<b>166.756.857.225,85</b>
	<b>Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>163.858.434.478,35</b>	<b>183.980.928.079,73</b>

<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan</b>		
<b>Arus kas Keluar</b>		
Belanja tanah	1.464.480.000,00	978.012.000,00
Belanja peralatan dan mesin	20.404.918.907,00	20.635.615.902,00
Belanja jalanan, irigasi, dan jaringan	68.325.569.655,50	69.000.038.808,00
Belanja gedung dan bangunan	131.241.491.321,89	69.178.655.978,00
Belanja aset tetap lainnya	770.082.200,00	456.967.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>222.206.542.084,39</b>	<b>160.249.289.688,00</b>
<i>Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan</i>	<b>(222.206.542.084,39)</b>	<b>(160.249.289.688,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00
Hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00
Penyertaan modal (investasi) pemda pada Bank Sumsel	0,00	2.000.000.000,00
Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Pemberian pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
<i>Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>	<b>0,00</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	9.179.018.692,00	7.978.530.533,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>9.179.018.692,00</b>	<b>7.978.530.533,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	9.179.874.607,00	7.978.530.533,00
Kas Bon di Bendahara Pengeluaran	563.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>9.742.874.607,00</b>	<b>7.978.530.533,00</b>
<i>Arus Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran</i>	<b>(563.855.915,00)</b>	<b>0,00</b>

<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas</b>		
<b>Selama Periode</b>	<b>(58.911.963.521,04)</b>	<b>21.731.638.391,73</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>166.687.805.874,40</b>	<b>144.956.167.482,67</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>107.775.842.353,36</b>	<b>166.687.805.874,40</b>
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>8.730.116.397,00</b>	<b>8.971.452.591,00</b>
<b>Kas di BUD</b>	<b>99.045.725.956,36</b>	<b>157.716.353.283,40</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>9.095.173,00</b>	<b>1.396.167,00</b>

Sumber : (Palembang.bpk.go.id)

### 2.2.9 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dengan menyediakan informasi-informasi yang diperlukan (Wuryan Andayani 2007 ; 136).

Sedangkan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan,
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya ( Mahmudi 2007 ; 5)

### **2.2.10 Kebutuhan Informasi Keuangan Daerah**

Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tersebut antara lain :

- a. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan.
- c. Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat resiko berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah.
- d. DPRD dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara.
- e. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima dikaitkan dengan kinerja.

### **2.2.11 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Manfaat laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya,
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi,
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor keinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.

### **2.2.12 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah**

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil (*outcome*) dari pengelolaan keuangan daerah sangat

dipengaruhi oleh seberapa bagus perencanaan yang dibuat.. Pada tahap ini, dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi *input*, proses dan *output*-nya. *Input* dalam tahap ini berupa dokumen perencanaan yang dimiliki pemerintah daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
6. Kebijakan Umum APBD (KUA)
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Sedangkan untuk Proses, terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan perencanaan dari atas (*top down*) dan partisipatif (*bottom up*). Pendekatan *top down* adalah berupa penentuan Kebijakan Umum APBD serta penetapan prioritas dan plafon anggaran, sedangkan perencanaan *bottom up* adalah berupa usulan program, kegiatan, dan anggaran dari masing-masing unit kerja.

Output dari tahap perencanaan ini adalah berupa RAPBD (Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah). Dikarenakan bagi pemerintah daerah, APBD merupakan tulang punggung pemerintah daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan distribusi, alokasi, dan stabilisasi keuangan daerah.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting, karena bagaimanapun bagus perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

## 3. Tahap Pelaporan

*Output* dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan. *Input* tersebut akan diproses lebih lanjut akan menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya (Mahmudi 2007 ; 14).

### **2.2.13 APBN dan APBD**

APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBD analog dengan kedudukan APBN dalam keuangan negara merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung. Definisi anggaran menurut *The National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*, anggaran merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan

untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Abdul Halim 2012 ; 15).

#### **2.2.14 Analisis Rasio Keuangan pada Pemerintahan Daerah**

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia (Abdul Halim 2012 ; 232).

Analisis rasio keuangan pada pemerintahan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relative sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya.

##### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

## 2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. Rasio ini untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Belanja Pembangunan}}$$

Keterangan :

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian daerah

(dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),  
Penerimaan Sumber Daya Alam, dan Bagian Daerah Lainnya )

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Biaya Wajib

Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal sebesar 2,5.

Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup menutup seluruh beban hutang berupa angsuran pokok dan bunga.

### **3. Rasio Keserasian**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana alokasi yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

### **4. Rasio Pertumbuhan**

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_n} \times 100\%$$

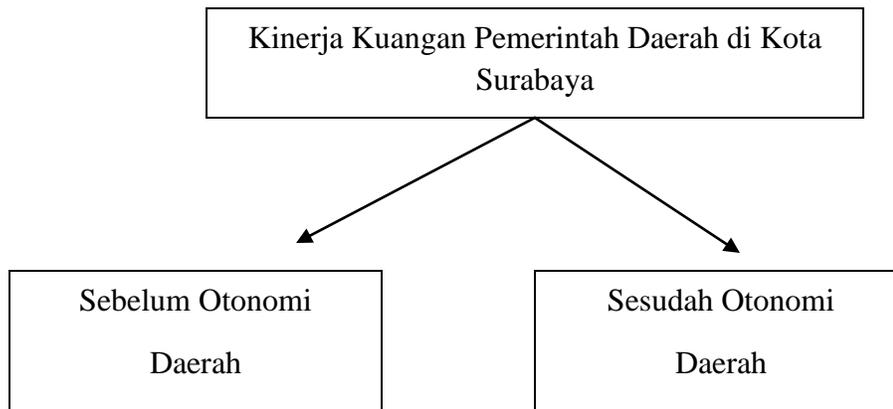
$P_n$  = Data Realisasi APBD yang diperoleh dari tahun yang dihitung

$P_o$  = Data Realisasi APBD yang diperoleh dari tahun sebelumnya

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini menggunakan sampel Pemerintahan Daerah di Surabaya. Dapat diketahui bahwa rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt Service Coverage Ratio*, Rasio Kesenjangan dan Rasio Pertumbuhan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah.

. Berdasarkan perhitungan rasio keuangan, akan diperoleh dari perhitungan tersebut menggambarkan kekuatan atau kelemahan dalam aspek keuangan yang dimiliki pemerintahan daerah.



**Gambar 2.3**

**Kerangka Pemikiran**